

MENAKAR KESADARAN PROFETIK ORGANISASI KEPEMUDAAN

(Studi Tentang Manajemen Pengkaderan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Komisariat Sunan Giri Cabang Ponorogo Tahun 2018-2019)

Ifan Matofani

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

matofani55@gmail.com

Agus Setyawan

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

setyawanagus@gmail.com

Abstrak

Keberagaman corak kesadaran profetik serara otomatis membentuk karakter masing-masing yang berbeda-beda pula, begitupun penataan dan strategi organisasi juga pasti beragam. Disini penelitian tentang kesadaran profetik dalam manajemen pengkaderan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sunan Giri Ponorogo Tahun 2018-2019 menjadi signifikan untuk dikaji. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan manajemen dan strategi pengkaderan dalam upaya menumbuhkan kesadaran profetik pada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sunan Giri Ponorogo. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan digunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan subyek dari penelitian ini adalah pengurus komisariat, meliputi ketua komisariat, sekretaris, wakil Ketua bidang Organisasi dan Pengkaderan. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni Bentuk manajemen pengkaderan pengkaderan dalam PMII mengklasifikasikan ada tiga macam yakni pengkaderan formal, non formal dan in formal. tiga aspek yang harus di tekankan dalam upaya senantiasa menumbuhkan kesadaran Profetik bagi kader, yakni Aspek transenden, humanism, dan liberasi. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran Profetik diantaranya : memberikan fasilitasi berupa ruang-ruang diskusi yang intens menyelenggarakan pelatihan/sekolah yang berskala melaksanakan rutinan yasinan setiap malam jum'at, pembiasaan sholat berjamaah. Adapun yang menjadi hambatan diantaranya; banyaknya pengaruh negatif yang menurunkan semangat para kader. kurangnya kesadaran berorganisasi dalam diri kader c) kurangnya istiqomah kader dalam menjalankan amaliyah Ubuddiyah. Solusi yang bisa diupayakan yaitu beberapa pendekatan-pendekatan seperti pendekatan struktural, pendekatan emosional, dan pendekatan personal.

Kata kunci : Profetik, Manajemen Pengkaderan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Abstract

The diversity of patterns of prophetic awareness automatically shapes each different character, as well as organizational arrangements and strategies must also vary. Here, research on prophetic awareness in the management of the Indonesian Islamic Student Movement's cadre organization Sunan Giri Ponorogo Commissariat for 2018-2019 becomes significant to study. This study tries to describe management and cadre strategies in an effort to foster prophetic awareness of the cadres of the Indonesian Islamic Student Movement Commissariat Sunan Giri Ponorogo. To obtain the necessary data, interview, observation and documentation methods were used, while the subjects of this study were the commissariat management, including the

chairman of the commissariat, secretary, deputy chairman of the organization and cadre. This type of research is descriptive qualitative. The result of this research is that the form of cadre management in PMII classifies there are three types, namely formal, non-formal and informal cadres. There are three aspects that must be emphasized in an effort to always foster prophetic awareness for cadres, namely the transcendent aspect, humanism, and liberation. The efforts made in order to foster prophetic awareness include: providing facilitation in the form of intense discussion rooms, conducting training/schools on a scale carrying out the yasinan routine every Friday night, habituation of congregational prayers. The obstacles include; many negative influences that lower the morale of the cadres. lack of organizational awareness in cadres c) lack of istiqomah cadres in carrying out the practice of Ubuddiyah. Solutions that can be sought are several approaches such as a structural approach, an emotional approach, and a personal approach.

Keywords: Prophetic, Cadre Management, Indonesian Islamic Student Movement

A. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri, perdebatan antara agama dan sains merupakan perdebatan abadi. Kedua entitas tersebut cenderung sulit dipersatukan. Agama memaksa sains agar terikat oleh nilai, sebaliknya, sains menuntut seseorang untuk menelanjangi dirinya dari segala macam bentuk dogma sebelum memasuki gerbang “kebenaran” objektif yang diidentikan dengannya. Dalam arti lain, sains harus bebas nilai.

Filsafat barat menitik beratkan epistemologi pengetahuannya melalui akal, dan Al-Qodi Abd Al-Jabbar seolah menegaskan, bahwa ada sebuah kebenaran hakiki melalui wahyu yang lebih tinggi di atas kebenaran yang diperoleh lewat akal (Hutasuhut:2017). Jika menilik lagi konsep ilmu sosial profetik Kuntowijoyo dan mengkontekstualisasikannya dengan peran cendekiawan sebagai suksesor dakwah Islam sejak Rasulullah SAW wafat, maka terlihat peran organisasi kepemudaan begitu kental dalam menjaga gawang struktur transendental Al-Qur’an, baik yang berkenaan dengan *muamalah* ataupun ibadah *mahdlah* (Kuntowijoyo:2007).

Kenyataan yang sungguh sangat ironis, mayoritas umat Islam di tanah air Indonesia, semestinya mampu mewarnai peradaban dan gerak sejarah, mampu meretas berbagai bentuk patologi sosial. Spirit kenabian (profetik) yang senantiasa diagung-agungkan setiap saat, sejatinya menjadi lokomotif perubahan, pembebasan, dan pemerdekaan. Adalah bukan hal yang mustahil bahwa, konfigurasi sosial yang seperti ini merupakan hal yang mungkin untuk diwujudkan sekiranya umat Islam benar-benar konsisten dan bersatu dalam membumikan nilai-nilai Ilahiah yang telah dikemaskan dengan luar biasa oleh para nabi dan rasul di zamannya

Pandangan yang mampu memberi petunjuk terkait dengan arah transformasi yang harus dituju. Atau dengan kata lain, konstruk pemikiran yang mampu menjembatani antara nilai-nilai ketuhanan yang bersifat mutlak dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Pada posisi inilah kiranya menarik untuk diketengahkan konsepsi Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo, selaku pemikirmuslim Indonesia yang menyadari efek modernisasi dan globalisasi, yakni terbentuknya masyarakat abstrak, masyarakat tanpa wajah kemanusiaan, masyarakat yang telah menjadi robot-robot industry (Kuntowijoyo :1991). Masyarakat yang krisis orientasi dan identitas sehingga cenderung mengadopsi budaya-budaya impor “Barat” tanpa dibarengi dengan sifat kritis, masyarakat yang lebih memetingkan aspek gengsi daripada fungsi sesuatu.

Seorang cendekiawan muda, M Mahbub Junaidi tahun 1960 an yang membuka kesadaran lebih luas tentang paradigma ini, ketika dia mengikutsertakan sejumlah orang untuk ikut bertanggung jawab atas kesadaran profetik dan mengkonsepsinya dalam bentuk organisasi (alfaz :2004). Mereka menyengajakan diri untuk terlibat dalam sejarah kemanusiaan dengan mengambil porsi besar tanggungjawab sosial dari masyarakat di Indonesia. Pembentukan organisasi ini agaknya merupakan titik tengah, atau bahkan perkawinan gejala sosial masyarakat (modernitas, sains, sosial-budaya.dan lain-lain) dengan nilai kebenaran agama. Dalam perpektif sosial profetik Kuntowijoyo, hal ini merupakan metodologi integralistik untuk mencapai peradaban kemanusiaan yang maju, serta upaya memecahkan masalah relasi antara Islam dan dunia modern yang menimbulkan ketegangan baik dengan sosial, kebudayaan dan politik.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sampai sekarang masih mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi pengkaderan harus mampu mengoptimalkan dan mengorientasikan seluruh aktivitas dan kegiatan organisasinya demi terwujudnya yang militan. Seluruh aktifitas dan kegiatan yang ada di dalamnya harus mampu menembus semua aspek dan lini sosial yang berkembang saat ini, sampai tahapan kader memiliki kesadaran profetik yang utuh. Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa dari seluruh pengkaderan formal dan non formal PMII baik itu Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) harus sebisa mungkin untuk diarahkan kepada pengembangan kesadaran profetik: Tujuan luhur PMII sesuai dengan AD/ART organisasi dapat tercapai secara maksimal sehingga membentuk kader *ulul albab* yang diharapkan (Hermawan : 2000). Untuk dapat mengarahkan hal tersebut, maka proses pengkaderan harus memiliki berbagai macam

perangkat pendukung diantaranya adalah tujuan pengkaderan, pengkader, peserta pengkaderan, proses pengkaderan materi dan metode.

Dengan usia PMII yang semakin dewasa, setidaknya harus memiliki kesadaran yang lebih sebagai upaya meningkatkan peran dalam pembangunan nasional, yang tidak lepas dari visi dan misi keislaman dan kebangsaan, serta lebih memiliki semangat juang dalam membentuk pribadi kader-kader yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga guna kemajuan agama, nusa dan bangsa khususnya pada ranah generasi muda. Partisipasi ini dilakukan secara terus menerus dengan kritis, konstruktif, obyektif dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan berdirinya PMII yaitu: terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang berbudi luhur, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT, cakap serta bertanggung jawab mengamalkan ilmu pengetahuannya. Dari latar belakang serta tujuan tersebut dan mengamati proses pelaksanaan pembangunan dalam PMII Komisariat Sunan Giri maka peneliti mengambil judul :“Menakar Kesadaran Profetik Organisasi Kepemudaan” (Studi Terhadap Manajemen Pengkaderan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sunan Giri Ponorogo Tahun 2018).

B. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif (Muhadjir : 1996). Secara sederhana penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman dengan metodologi berupa penyelidikan pada suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Prof. Burhan Bungin, pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas. Penulis akan memaparkan dari data yang diperoleh dari sumbernya berupa kata-kata tertulis atau dari kata-kata melalui orang yang diamati atau berupa gambar mengenai fenomena sosial yang berlangsung terjadi pada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sunan Giri Ponorogo.

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dimana metode ini akan memberikan deskripsi tentang kondisi situasi sosial pada saat ini. Dimana hasil penelitian ini akan menjelaskan gambaran atau kondisi manajemen pengkaderan di lingkup Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sunan Giri Ponorogo. Menurut Atherton dan Klemmack, 1992 sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah lama dikenal sebagai salah satu kekuatan dari gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia. Dengan usia yang tidak lagi muda, PMII telah melewati atau bahkan ikut berperan dalam sejarah kehidupan politik sosial dan budaya di Indonesia. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa gerakan-gerakan mahasiswa tidak akan pernah lepas dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemunculan PMII juga hampir sama dengan kemunculan organisasi-organisasi lain, yang mana kemunculannya dilatarbelakangi untuk menjawab dan sebagai respon dari berbagai macam persoalan kebuntuan-kebuntuan struktural, kultural dan konstitusional lembaga-lembaga politik, sosial, budaya dan hukum yang telah ada. Karna bagaimanapun persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan oleh kelompok-kelompok yang berbekal peralatan intelektual sehingga mampu membaca dinamika dan kontradiksi-kontradiksi sosial yang terjadi.

Melalui gerakan massif yang bertarget pendek dengan melakukan perubahan-perubahan struktural, serta gerakan-gerakan pengkaderan yang berjangka dan bertarget panjang pada perubahan- perubahan yang lebih mendasar, PMII memenuhi tanggung jawab sebagai salah satu *agent of social change dan agent of social control*.

PMII komisariat Sunan Giri Ponorogo dalam struktur organisasi berada di bawah PB (Pengurus Besar) PMII, PKC (Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Timur) dan PC (Pengurus Cabang Ponorogo) serta membawahi beberapa rayon, sampai pada pertengahan tahun 2019 , PMII Komisariat memebwahi tiga rayon yang terebar di dua kampus yakni INSURI Fakultas Tarbiyah kemudian di sebut Rayon “TARBIYAH” dan Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah kemudian disebut Rayon “SYAHDA”. Selain itu ada dikampus AKAFARMA kemudian disebut dengan Rayon “FARMASI”.

Masing-masing rayon tersebut secara kelembagaan berada di bawah cabang. Namun pada fungsinya, cabang tidak secara penuh mengintervensi rayon tetapi lebih sekedar sebagai fasilitator dan mediator Rayon atau Komisariat. Sedangkan dalam struktur kelembagaan PMII Komisariat Sunan Giri Ponorogo selalu mengalami perubahan pada saat Rapat Tahunanan Komisariat Hal ini didasari atas kebutuhan hasil pembacaan internal dan eksternal yang komprehensif. Dan dari sisi aturan legal organisasi, hal ini tidak menjadi masalah karena

berkaitan dengan pengembangan organisasi baik lokal maupun regional sepanjang tidak menyalahi AD/ART. Alasan perubahan ini juga didasarkan pada efektifitas serta akomodatif.

Biarpun demikian tidak semua mengalami perubahan. Paling tidak ada beberapa hal yang konsisten dalam struktur kelembagaan, yaitu Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa bidang garapan yang meliputi bidang pendidikan dan pengaderan (Departemen Pendidikan dan Pengaderan), bidang kajian, bidang penerbitan, bidang sosial politik (Departemen Sosial dan Politik), bidang pemberdayaan dan advokasi perempuan (Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Perempuan/ LPSAP).

Beberapa bidang yang dianggap khusus diposisikan istimewa di lembaga semi-otonom Komisariat. Lembaga ini diberi kebebasan mengelola program dan pengembangan lembaga tetapi tetap berada di bawah struktur serta koordinasi Komisariat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Perempuan (LPSAP) –lembaga ini merupakan wadah pengganti KOPRI.

Dari beberapa bidang garapan PMII tersebut, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

- a) Bidang pendidikan dan pengkaderan masuk dalam Departemen Pendidikan dan Pengkaderan. Departemen ini bertugas untuk merumuskan konsep pendidikan dan pengaderan di tingkat cabang, komisariat dan rayon serta melaksanakan pelatihan dalam rangka mempersiapkan proses pengkaderan.
- b) Bidang sosial politik masuk dalam Departemen Sosial dan Politik (Depsospol) Departemen ini bertugas melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isu-isu sosial politik, serta mengambil kebijakan taktis strategis berkaitan dengan bidang sosial politik.
- c) Bidang kajian dan penerbitan ini tidak selalu berada dalam satu departemen. Namun fungsi dan tugasnya tidak jauh berbeda jika dipisah atau dijadikan satu. Bidang kajian bertugas melaksanakan program yang berkaitan dengan kajian dan pemberdayaan kader dalam bidang intelektual. Sedangkan penerbitan berkaitan dengan program yang berkaitan dengan penerbitan.
- d) Bidang advokasi dan pemberdayaan perempuan diamanatkan ke Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Perempuan (LPSAP). Bidang ini menggarap program yang berkaitan dengan pengembangan studi dan advokasi khususnya dalam koridor perempuan sebagai

obyek kajian, serta menjalin kerja sama dengan pihak/organisasi yang konsen terhadap isu-isu keperempuanan.

- e) Bidang advokasi masyarakat berada di bawah tanggungjawab Lembaga Advokasi Masyarakat (LAMAS). Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan program berupa kontribusi baik pemikiran, moral maupun advokasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan keadvokasian, khususnya terhadap kaum-kaum tertindas.

Walaupun dalam berbagai bidang tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda, tetapi dalam realitasnya tetap berada dalam satu fungsi yakni memfasilitasi dan melakukan pengkaderan baik di tingkat komisariat dan rayon. Serta secara umum mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan eksistensi organisasi di tingkat kampus. Pengambilan kebijakan dengan memunculkan sebuah lembaga semi-otonom ataupun justru membubarkannya diambil di Rapat Tahunan Komisariat (RTK) yang merupakan keputusan tertinggi di wilayah Komisariat. Refleksi serta berbagai pembacaan baik internal yang menyangkut efektifitas kerja departemen tersebut maupun eksternal yang merupakan hasil pembacaan situasi eksternal dan kebutuhan kader—seringkali menjadi pertimbangan sendiri untuk mengambil keputusan tersebut.

Biarpun keputusan dalam RTK merupakan keputusan tertinggi namun refleksi serta agenda-agenda pembahasan dalam RTK tersebut didahului oleh penggodokan materi RTK oleh tim SC (*Steering Committee*). Beberapa hal yang biasanya menjadi bagian pembahasan adalah menyangkut Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK), Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) serta pokok-pokok pikiran dan rekomendasi, yang pembahasannya dibagi dalam komisi-komisi. Serta ditambah dengan materi-materi lain yang berkaitan dengan teknis jalannya RTK, mulai dari tata tertib Rapat sampai mekanisme pemilihan ketua Komisariat.

Keputusan dalam RTK tersebut hanya menyangkut persoalan-persoalan besar organisasi, sementara penjabaran kinerja serta langkah-langkah pengurus direncanakan dalam rapat kerja pengurus, yang didahului dengan pembekalan melalui pembacaan internal dan eksternal organisasi. Sementara beberapa keputusan dalam rapat kerja tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana idealitasnya seiring dengan tidak optimalnya kinerja beberapa pengurus.

Tidak optimalnya kinerja pengurus merupakan masalah klasik yang dihadapi organisasi kader semacam PMII, terlebih kader-kadernya masih menyangang status sebagai mahasiswa yang dituntut studinya. Belum masalah orientasi organisasi yang memang bukan merupakan

organisasi profit yang menjanjikan kesejahteraan bagi pengurus ataupun kadernya. Adapun struktur kepengurusan PMII Komisariat Sunan Giri ponorogo tahun 2018-2019 yakni :

NO	NAMA	Keterangan
	Sholikin	Ketua MABINKOM
	Syamsul Ma'arif	Ketua IKA PMII INSURI
1.	Amirul Muklisin	Ketua komisariat
2.	Aziza Nugraheni	Sekretaris umum
3.	Nurul maesaroh	Bendahara umum
4.	Rizky Syahputra	Waka 1
5.	Siswanto	Coordinator biro kaderisasi
6.	Muh yasin	Coordinator biro kerumahtanggan
7.	Yeni Tri Astuti	Anggota
8.	Darul irfani	Anggota
9.	Mahrus	Anggota
10.	Hanim Magfiroh	Mandataris Ketua KOPRI
11.	Abdulloh	Anggota
12.	Afidatul amanah	Anggota
13.	Renis cahyanistiyas	Anggota
14.	Tutik dewi badriyah	Ketua KOPRI Tarbiyah
15.	Vina dini rahayu	ANGGOTA
16.	Ma'ruf	Ketua Rayon Tarbiyah
17.	Abdulloh indriawan	Ketua Rayon Syahda
18.	Annik yulianti	Ketua Rayon Akafarma

Penerimaan menjadi anggota PMII dimulai dari tingkat rayon yang notabene merupakan struktur organisasi yang paling bawah dan bersentuhan langsung dengan kader. Rayon secara langsung bertanggungjawab terhadap rekrutmen massa serta pelaksanaan pengaderan awal PMII. Secara normatif, dalam Anggaran Rumah Tangga PMII bab III bagian II pasal 4 disebutkan bahwa penerimaan anggota didahului dengan mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada Pengurus Cabang. Dan telah sah menjadi anggota PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) dan mengucapkan baiat persetujuan dalam suatu upacara pelantikan yang diadakan oleh Pengurus cabang.

Rekrutmen anggota PMII di beberapa perguruan tinggi diadakan setiap tahun dan ditangani oleh pengurus rayon atau komisariat. Di beberapa perguruan tinggi, MAPABA secara langsung ditangani oleh rayon. Namun tak jarang pula secara kolektif dilakukan di komisariat. Bahkan ada pula yang karena ketidakmampuannya, ditangani secara penuh oleh cabang. Di komisariat Sunan Giri, misalkan, MAPABA ditangani dan diselenggarakan secara langsung oleh

rayon. Hal ini dikarenakan rekrutmen yang dilakukan di masing-masing rayon berhasil menjaring peserta minimal 50% dari mahasiswa yang diterima di fakultas masing-masing. Akan tetapi dalam rangka sapu bersih kader pengurus komisariat juga melaksanakan Kaderisasi MAPABA.

Sementara untuk memperlebar sayap organisasi di perguruan tinggi yang lain, jalur kultural dianggap efektif. Praktisnya dilakukan dengan dua cara, yakni membangun kontak person dengan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut serta mengundang mereka dalam kegiatan-kegiatan PMII. Hal ini dapat mengembangkan *ghirah* untuk membentuk Rayon dan atau komisariat baru.

Anggota yang telah resmi masuk ke PMII praktis terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh PMII. Terlebih PMII sendiri merupakan organisasi ideologi yang memegang teguh prinsip-prinsip teologis dan ideologi yang menjadi pegangannya. Dan jika secara prinsipil anggota tersebut melanggar AD/ART serta ketentuan-ketentuan dalam PMII, maka dia dapat dipecat keanggotaannya. MAPABA dalam tertib administrasi merupakan persyaratan untuk menjadi anggota PMII, pengurus rayon. Yang diharapkan dari MAPABA ialah menghasilkan kualitas kaderbasis, profesional dan kader administrator. Karena merupakan pengaderan awal, PMII memainkan peran persuasi dengan memasuki wilayah mereka dan dikeluarkan dari pintu kita.

Pelatihan Kader Dasar merupakan jenjang pengaderan formal setelah MAPABA. PKD biasanya diikuti sebagai syarat menjadi ketua komisariat. Kader yang dimunculkan dari PKD diharapkan merupakan intelektual organis dengan kapasitas visi dan teknikalitas yang dapat diandalkan. Kualifikasi minimal dari kader ini adalah dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan kader umum, menyumbang waktu dan tenaga dalam kepanitiaan, mampu mengidentifikasi bakat dan minat khusus dalam berorganisasi, mendapatkan tugas-tugas khusus dalam organisasi serta memiliki keandalan dalam memimpin organisasi atau keandalan dalam bidang tertentu.

Pelatihan kader Lanjut diarahkan untuk membentuk social organizer atau community organizer yang seharusnya menjadi syarat bagi ketua cabang. Pembekalan yang dilakukan di PKL ini menyangkut persoalan visi, teori-teori sosial, perangkat analisis, dan skill organisatoris. Dalam PKL ini diharapkan tercipta kader yang memenuhi kualifikasi kamil yang bercirikan

melampaui pengalaman organisasi formal, mampu menjadi juru bicara bagi komunitas lain, mampu memimpin secara pro-aktif terhadap perubahan-perubahan strategis, serta memiliki kemampuan leadership kuat, manajerial, atau kapasitas intelektual tinggi.

Pelatihan kader nasional secara umum bertujuan untuk membentuk kader *Muharik*, yakni kader calon pemimpin yang berwawasan luas dan berkualitas dengan kategori kader penggerak. Secara khusus yakni menciptakan ideology organisasi, mampu mengidentifikasi ruang gerak PMII saat ini dan masa yang akan datang. Analisa kajian materi PKN lebih banyak berbicara sebagai penggerak, seperti aktualisasi fiqih kontemporer, geospol dan penguasaan politik dan ruang strategis.

Untuk tercapainya cita-cita tersebut, maka kaderisasi harus memiliki konsep dan perangkat pendukung yang jelas, diantaranya adalah tujuan kaderisasi, pengkader, kader dan anggota, proses kaderisasi, materi kaderisasi dan metode. Walaupun demikian sebenarnya secara gamblang PMII komisariat Sunan Giri Ponorogo telah memiliki dan telah mengimplementasikan perangkat-perangkat tersebut dengan bertahan dan komprehensif.

Pada penelitian ini akan diuraikan beberapa perangkat kaderisasi PMII Komisariat Sunan Giri Ponorogo: *pertama*, Tujuan, Anggaran Dasar PMII sudah sangat jelas memberikan deskripsi orientasi (AD PMII Bab IV Pasal 4) yaitu tentang terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Terbentuknya kader ulul albab yang secara komprehensif mengakumulasi Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh. *Kedua*, Pengkader, dalam PMII sering menyebut sebagai Instruktur dan senior sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman Instruktur adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendinamisasikan proses kaderisasi agar proses transformasi knowledge dan value berjalan dengan maksimal. *Ketiga*, kader, atau yang biasa disebut anggota, adalah subjek kaderisasi yang otonom atau komponen masukan dalam sistem kaderisasi, yang selanjutnya diproses dalam proses pengkaderan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan kaderisasi. *Keempat*, Proses Kaderisasi, adalah Interaksi edukatif dan proses komunikasi timbal balik antara pengkaderan dengan kader yang terarah kepada tujuan kaderisasi. Dalam Multi Level Strategi yang dimiliki PMII sudah dijelaskan alur panjang proses kaderisasi, dimana secara universal menggambarkan proses input (rekrutmen, pra pelatihan), proses (pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pendidikan formal: MAPABA, PKD, PKL), output

(terbentuknya anggota mu'taqid, kader mujahid dan mujtahid), outcome (distribusi kader). *Kelima*, Materi atau Kurikulum, adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang diarahkan pada upaya pencapaian tujuan kaderisasi. Materi atau kurikulum kaderisasi pun sudah termaktub dalam buku pedoman hasil workshop kaderisasi yang pernah didialektikkan oleh PB PMII. Secara sistematis dalam buku tersebut sudah terklasifikasikan materi-materi untuk pendidikan (formal, informal dan non formal) dalam PMII. *Keenam*, Metode, cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Oleh sebab itu, sebagai lembaga kaderisasi yang memiliki tahapan dalam prosesnya, maka PMII Komisariat Sunan Giri Ponorogo pun sudah mengklasifikasikan metode yang digunakan dalam setiap proses kaderisasinya, MAPABA dengan metode doktrinasi agar terbentuknya anggota yang yakin (mu'taqid) terhadap nilai-nilai yang ditawarkan PMII Komisariat, sedangkan PKD menggunakan metode Indoktrinasi yang diharapkan dapat terwujudnya kader mujahid, PKL menggunakan metode Partisipatoris yang harapan besarnya mampu terciptanya kader mujtahid.

Dengan demikian, PMII Komisariat Sunan Giri Ponorogo sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar atas perkembangan dan perubahan Bangsa harus mampu turut serta melakukan proses pendidikan dan kaderisasi sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tipikal yang disesuaikan dengan karakter pergerakannya. Dengan proses kaderisasi yang dianggap sudah sangat ideal, diharapkan mampu menyentuh aspek kognitif dengan memberikan beberapa pengetahuan terkait kebutuhan manusia dalam mengarungi kehidupannya. Aspek afektif yang menjadikan dasar nilai dan sikap dalam rangka bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga aspek psikomotorik yang dijadikan bekal (soft-skill) bagi kader untuk menjangkau kebutuhan profesional di lingkungan kerja.

Adapun secara perinci program kerja pengkaderan PMII Sunan Giri Ponorogo sebagai berikut :

Kegiatan Tahunan		
Kadserisasi FORMAL		
NO	NAMA PROGAM	KET
1.	Mapaba	Sep-okt 2018
2.	PKD	2 feb 2019
Kaderisasi Non formal		
1.	Pelatihan TOF	
2.	Sekolah filsafat	
3.	Sekolah media	

4.	Sekolah Gerakan	
5.	Sekolah ASWAJA	
6.	Pesantren Pergerakan	
Kegiatan Bulanan		
1.	Anjangsana pergerakan	1x bulan
2.	Camping Pergerakan	1x bulan
3.	Khataman alquran	1x bulan
4.	Ziaroh auliya'	1x bulan
5.		
Kegiatan Mingguan		
1.	Yasin dan tahlil	Setiap malam jum'at
2.	Ngaji sorogan kitab bidayatul bidayah	Setiap malam sabtu
3.	Kajian tematik dengan cabang	Setiap malam ahad
4.	Kajian follow up paska mapaba	Setiap malam rabu
5.	Kajian fakultatif	Setiap malam kamis
Kegiatan Harian		
1.	Sholat jamaah di Masjid Sunan Giri	
2.	Mmembaca dan resensi buku-buku pengetahuan	

D. Kesimpulan

Dalam hal membentuk nilai-nilai profetik, PMII Sunan Giri senantiasa memperhatikan beberapa aspek yang teori keprofetikan. Yakni dalam hal transendensi di tunjang dengan yasinan, khataman al-quran, pengajian kitab kuning dan membiasakan sholat jamaah. Adapun dalam aspek kemanusiaan pengkaderan PMII Sunan Giri Ponorogo selalu menekan sisi kemanusiaan seperti menghilangkan budaya bullying, menciptakan pola komunikasi yang persuasif

Daftar Pustaka

Alfas Fauzan, *PMII Dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan*, (Jakarta: PB PMII, 2004)

Buku pedoman penulisan skripsi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M)

INSURI Ponorogo

Heddy Shri Ahimsa Putra, *Paradigm Profetik Islam, Epistemology, Etos, Dan Model gadjahmada* university Press, Yogyakarta, 2018

- Hermawan, Eman *Menjadi Kader Pergerakan: Dari Simpatisan Menjadi Kader Militan, Dari Individu Menjadi Organizer*, (Yogyakarta: KLINIK, 2000)
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1997),
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1999),
- Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas* (Cet. I; Bandung: IKAPI, 2002)
- M. Dawam Raharjo, *Ilmu Sejarah Profetik dan Analisis Transformasi Masyarakat dalam Kuntowijoyo, Paradigma Islam*
- Mas'ud Abdurrahman, *Menuju Paradigma Islam Humanis* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2003),
- Murtadha Muthahari, *Society and History*. terj. M. Hashem, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya* (Cet. V; Bandung: Mizan, 1995)
- Sugiyono, *metodeologi penelitian pendidikan*, (bandung : Alfabeta, 2006)
- Umam Chatibul, *Sekitar Kelahiran PMII, dalam Muhammad Fajrul Falah* (penyunting), *Citra Diri PMII*, (Yogyakarta: Yayasan Patria Nusantara, 1988)